

LAMPIRAN
LAPORAN TAHUNAN KPK
2019



KERJA SAMA

KERJA SAMA

Nota Kesepahaman / Perjanjian Kerja Sama

No.	Mitra	Keterangan
1	Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara	<p>Kerja sama dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani oleh Hary Budiarto selaku Deputy Bidang Informasi dan Data KPK dan Rinaldy Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara pada 7 februari 2019 yang mana ruang lingkupnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan sertifikat elektronik 2. Penerbitan sertifikat elektronik 3. Pemanfaatan sertifikat elektronik dalam sistem elektronik 4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan sertifikat elektronik
2	BPJS Ketenagakerjaan	<p>Kerja sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto tanggal 13 Februari 2019 dengan nomor 164 Tahun 2019 dan nomor MOU/2/022019 yang mana ruang lingkupnya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pertukaran data dan informasi b. Pencegahan tindak pidana korupsi c. Pendidikan, pelatihan dan sosialisasi d. Kajian dan penelitian e. Narasumber f. Lingkup lainnya sesuai kesepakatan para pihak
3	Ombudsman Republik Indonesia	<p>Kerja sama dalam rangka Optimalisasi Upaya Pemberantasan Korupsi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik ditandatangani oleh Agus Rahardjo selaku Ketua KPK dan Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., P.hd. selaku Ketua Ombudsman RI pada 18 Maret 2019 yang mana ruang lingkupnya meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertukaran informasi dan data 2. Tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) 3. Penelitian 4. Pendidikan dan pelatihan
4	<ul style="list-style-type: none"> - Fakultas Hukum Universitas Bengkulu - Lembaga Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat - Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 	<p>Kerja sama Kajian Putusan dan Pemanfaatan Hasil Perekaman Persidangan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani oleh Sugihartono Selaku PPK Deputy Bidang Informasi dan Data KPK dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H., M.H. selaku Dekan FH Unib tanggal 30 April 2019 dengan nomor 212 Tahun 2019 dan nomor 1083/UN.30.8/KS/2019. 2. Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. selaku Direktur LKABH UMI tanggal 30 April 2019 dengan nomor 211 Tahun 2019 dan nomor 030/B/LKaBH-UMI/IV/2019. 3. Dr. Sukmareni, S.H., M.H. selaku Dekan FH UMSB tanggal 30 April 2019 dengan nomor 210 Tahun 2019 dan nomor 0826/II.3.AU/A/2019. 4. Dr. Abdul Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama UMS tanggal 30 April 2019 dengan nomor 209 Tahun 2019 dan nomor 0375/MoU/II.3.AU/A/2019. 5. Prof. Dr. Ir. M. Arief Soendjoto, M.Sc. selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unlam tanggal 30 April 2019 dengan nomor 213 Tahun 2019 dan 196/UN8.2/PP/2019

No.	Mitra	Keterangan
5	Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia	<p>Kerja Sama tentang Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang ditanda tangani oleh</p> <p>Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Ketua Kwarnas Pramuka Indonesia Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Budi Waseso tanggal 27 Juni 2019 dengan nomor 226 Tahun 2019 dan nomor 007/PK-MoU/2019 yang mana ruang lingkupnya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan antikorupsi Sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi Kampanye antikorupsi
6	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Pada Kedeputusan Statistik Sosial - Badan Pusat Statistik	<p>Kerja sama tentang Survei Penilaian Integritas Tahun 2019 yang ditandatangani oleh</p> <p>Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana dan Direktur Statistik Ketahanan Sosial Harmawanti Marhaeni tanggal 11 Juli 2019 dengan nomor 228 Tahun 2019 dan nomor 16.12.16/KS.P/11-VII/2019 yang mana ruang lingkupnya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan data dan informasi Pengolahan data dan informasi Penyajian data dan informasi Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Peningkatan kapasitas SDM Hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan SPI 2019
7	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Pada Kedeputusan Statistik Sosial - Badan Pusat Statistik	<p>Kerja sama tentang Survei Penilaian Integritas Tahun 2019 yang ditandatangani oleh</p> <p>Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana dan Direktur Statistik Ketahanan Sosial Harmawanti Marhaeni tanggal 11 Juli 2019 dengan nomor 228 Tahun 2019 dan nomor 16.12.16/KS.P/11-VII/2019 yang mana ruang lingkupnya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan Data dan Informasi Pengolahan Data dan Informasi Penyajian Data dan Informasi Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Peningkatan Kapasitas SDM Hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan SPI 2019
8	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	<p>Kerja sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani oleh</p> <p>Ketua KPK Agus Rahardjo dan Kepala BPPT Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc., IPIJ. tanggal 01 Agustus 2019 dengan nomor 230 Tahun 2019 dan nomor 69/MOU/BPPT-KPK/08/2019 yang mana ruang lingkupnya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertukaran informasi dan data Pencegahan tindak pidana korupsi Pendidikan, pelatihan dan sosialisasi Kajian dan penelitian Narasumber, tenaga ahli, sarana/prasarana
9	Universitas Patria Artha	<p>Kerja sama dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani oleh</p> <p>Ketua KPK Agus Rahardjo dan Rektor Universitas Patria Artha Bastian Lubis, S.E., M.M. tanggal 07 Agustus 2019 dengan nomor 233 Tahun 2019 dan nomor 085/KS-UPA/VIII/2019 yang mana ruang lingkupnya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan antikorupsi Perbaikan tata kelola universitas Kajian dan riset antikorupsi Sosialisasi dan kampanye antikorupsi Narasumber dan ahli Lingkup lainnya sesuai kesepakatan para pihak

No.	Mitra	Keterangan
10	Universitas Islam Bandung	Kerja sama dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Rektor Universitas Islam Bandung Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. tanggal 15 Agustus 2019 dengan nomor 242 Tahun 2019 dan nomor 246/C.01/Rek/2019 yang mana ruang lingkupnya meliputi : a. Pendidikan dan pelatihan antikorupsi b. Pengkajian dan penelitian c. Pembangunan budaya antikorupsi/integritas d. Narasumber dan e. Lingkup lainnya sesuai kesepakatan para pihak
11	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Kerja sama dalam Pemanfaatan Hasil Perekaman Persidangan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani oleh Sugihartono Selaku PPK Deputi Bidang Informasi dan Data KPK dan Eko Suwardi, M.Sc., Ph.D. selaku Dekan FEB UGM tanggal 02 September 2019 dengan nomor 261.1 Tahun 2019 dan nomor 5876/UN1/FEB/KIAH/PT/2019 yang mana ruang lingkupnya meliputi : a. Pendidikan dan pelatihan antikorupsi b. Pengkajian dan penelitian c. Pembangunan budaya antikorupsi/integritas d. Narasumber dan f. Lingkup lainnya sesuai kesepakatan para pihak
12	Bank Indonesia	Kerja sama dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo tanggal 20 September 2019 dengan nomor 266 Tahun 2019 dan nomor 21/10/NK/GBI/2019 yang mana ruang lingkupnya meliputi : a. Pertukaran data dan informasi b. Pencegahan tindak pidana korupsi c. Pendidikan dan pelatihan d. Kajian/penelitian e. Penyediaan personil, narasumber, dan tenaga ahli f. Pemberian informasi dan/atau bantuan konsultasi g. Kerja sama lain yang disepakati para pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
13	National Anti Corruption Commission (NACC) Thailand	Kerja sama internasional untuk pemberantasan korupsi yang ditandatangani oleh Laode Muhammad Syarif selaku Komisioner KPK dan Pol. Gen. Watcharapol Prasarnrajkit selaku Ketua National Anti Corruption Commission (NACC) Thailand pada 9 Oktober 2019
14	Universitas Telkom	Kerja sama dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Rektor Universitas Telkom Prof. Dr. Adiwijaya tanggal 17 Desember 2019 dengan nomor 441 Tahun 2019 dan nomor 074/SAM3/PUS/2019 yang mana ruang lingkupnya meliputi : a. Pendidikan dan pelatihan antikorupsi b. Pengkajian dan penelitian c. Pembangunan budaya antikorupsi/integritas d. Sosialisasi dan kampanye antikorupsi e. Narasumber f. Lingkup lainnya sesuai kesepakatan para pihak

Implementasi Kerja Sama Multilateral

No.	Kegiatan	Keterangan
1	United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)	<p>Pada tahun 2019, KPK berhasil menyelesaikan <i>country review report</i> Indonesia dan mengirimkan hasil reuiu UNCAC baik putaran I dan II kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti. <i>Country review report</i> Indonesia berisi laporan lengkap yang mencakup seluruh kerangka hukum dan kelembagaan sebagai hasil review implementasi UNCAC bab II Pencegahan dan Bab V Pemulihan Aset di Indonesia termasuk praktik baik, tantangan dan kebutuhan bantuan teknis.</p> <p>KPK berpartisipasi aktif dalam pertemuan rutin terkait UNCAC:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10th regular session of the Implementation Review Group/IRG (27-29 Mei 2019), 13th session of Open-Ended Intergovernmental Working Group on Asset recovery (29-30 Mei 2019) dan 8th session of the open-ended Intergovernmental Expert Meeting on International Cooperation (31 Mei 2019) 2. 1st Resumed 10th Session of the Implementation Review Group/IRG (2-4 September 2010), 10th Session of the Open-Ended Intergovernmental Expert Meeting on Prevention (4-6 September 2019) serta pertemuan bilateral Amerika-Indonesia yang dilaksanakan di sela-sela kegiatan. 3. Rangkaian pertemuan Conference of State Parties (CoSP) UNCAC di Abu Dhabi UEA, 16-20 Desember 2019, dimana pertemuan ini merupakan pertemuan tingkat tinggi dari UNCAC. <p>Pada CoSP UNCAC, delegasi dari KPK juga berpartisipasi dengan menjadi narasumber pada rangkaian pertemuan (side event) terkait CoSP UNCAC, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ensuring Protection of Anti-Corruption Agencies (ACA) and Anti-Corruption Agencies' Officers, pada side event ini, KPK merupakan co-organizer. 2. From Theory to Practice: What do Anti-Corruption Authorities really look like? 3. Beneficial Ownership Disclosure: Towards Transparency of Corporate Networks 4. Making transparency work: Technology-driven approaches to facilitate public access to information <p>Sebagai salah satu implementasi komitmen global di level nasional, PJKAKI bersama dengan Setnas PK dan Dikyanmas mendorong KemenBUMN untuk meningkatkan sistem manajemen antisuap. KemenBUMN mengeluarkan SE No 2/MBU/07/2019 tentang pengelolaan BUMN yang bersih melalui implementasi pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanganan benturan kepentingan serta penguatan pengawasan internal pada Juli 2019</p>

No.	Kegiatan	Keterangan
2	Diseminasi komitmen global dari forum multilateral	<p>KPK melakukan diseminasi komitmen global dari forum multilateral sepanjang tahun 2019. Kegiatan telah dilaksanakan di Yogyakarta, Padang, Samarinda, Surabaya dan Bandung.</p> <p>KPK bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri juga menyusun buku komitmen global Indonesia di forum antikorupsi UNCAC dan G20 yang berisi Indonesia executive summary review UNCAC Putaran I dan II, Jakarta Statement, G20 High Level Principles periode 2012-2018. Buku ini akan didiseminasikan pada 2020 kepada universitas mitra dan perwakilan masyarakat sipil.</p>
3	G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG)	<p>KPK menjadi bagian penting dari delegasi Indonesia pada rangkaian pertemuan G20 ACWG1 pada tanggal 21-23 Januari 2019 di Tokyo, Jepang. Dalam ACWG I, KPK mengirimkan delegasi untuk memberikan kontribusi aktifnya, terutama untuk mengukuhkan komitmen negara anggota G20 dalam mencegah dan memberantas korupsi. KPK juga menjadi salah satu narasumber dalam side event G20 bertajuk Workshop Promoting Integrity and Transparency in Infrastructure Development dengan memaparkan mengenai pencegahan dan penanganan kasus korupsi terkait infrastruktur di Indonesia.</p> <p>Pertemuan ACWG I membahas salah satunya mengenai rencana kerja tahunan Presidensi Jepang untuk G20 ACWG 2019, pembahasan High Level Principles yang akan dibahas di tahun 2019 dan metodologi kerja ACWG. Hasil pertemuan G20 ACWG tahun 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan akuntabilitas dari setiap negara-negara anggota G20 ACWG, termasuk Indonesia. 2. Dokumen-dokumen hasil kesepakatan seperti panduan praktik-praktik baik dalam pencegahan dan penanganan konflik kepentingan, dan panduan kerjasama internasional yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi serius dan pemulihan aset. 3. Tindak lanjut komitmen-komitmen yang telah disepakati pada pertemuan-pertemuan G20 ACWG seperti pada Rencana Aksi G20 ACWG tahun 2019-2021
4	APEC Anti-Corruption and Transparency Working Group (ACTWG)	<p>Peran penting KPK terkait APEC pada 2019 adalah dengan berkontribusi aktif dalam pertemuan rutin APEC:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan APEC Anti-Corruption and Transparency Working Group (ACTWG) , 27 Februari – 2 Maret 2019 di Santiago, Chile. Pada pertemuan ini juga diadakan Workshop: on Digital Government, Integrity Policies and Corruption Prevention Mechanisms in APEC Economies. Pertemuan ini membahas salah satunya mengenai ACTWG Work Plan 2019 dan ACTWG Strategic Plan 2013-2021. KPK memaparkan mengenai kemajuan implementasi UNCAC dan Beijing Declaration di Indonesia serta memaparkan tentang isu gender dan antikorupsi.

No.	Kegiatan	Keterangan
5	South East Asia Parties Against Corruption (SEA-PAC)	<p>KPK menyampaikan laporan Capacity Building Stocktaking Programme dalam SEA-PAC Secretariat meeting di Singapura, pada Juli 2019. Laporan tersebut adalah hasil analisa dari kuesioner KPK kepada negara anggota SEA-PAC untuk mengidentifikasi isu bersama yang dihadapi oleh lembaga antikorupsi di Asia Tenggara. Jawaban tersebut mengusung tema dalam kegiatan pelatihan bersama negara anggota SEA-PAC.</p> <p>KPK juga berkontribusi aktif dalam dua pertemuan rutin SEA-PAC yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 15th Southeast Asia Parties Against Corruption (SEA-PAC) Secretariat Meeting di Singapura, 9-10 Juli 2019 2. 15th South East Asia Parties Against Corruption (SEA-PAC) Principals Meeting pada 8-10 Oktober 2019 di Bangkok, Thailand <p>Pertemuan the 15th SEA-PAC Principals Meeting dihadiri oleh pimpinan KPK dan telah berhasil menyepakati penggantian nama SEA-PAC menjadi ASEAN-PAC dan ASEAN-PAC Action Plan 2020-2022. KPK telah memberikan kontribusi pada forum dengan menjadi penyelenggara Regional Workshop on Private Sector Corruption: Legal Frameworks, Enforcement and Prevention pada 23-25 September 2019 di ACLC, Jakarta.</p>
Workshop/Pelatihan		
6	Regional workshop on private sector corruption: Legal frameworks, enforcement and prevention pada 23-25 September 2019.	KPK bersama ASEAN-USAID dan UNODC telah melaksanakan Regional workshop on private sector corruption: Legal frameworks, enforcement and prevention pada 23-25 September 2019 dengan ACLC KPK menjadi tuan rumah. Workshop ini dihadiri oleh 27 peserta dari Asia Tenggara dan melibatkan 12 pembicara internasional dan nasional. Workshop ini diadakan dalam kerangka kerja sama South East Asia Parties Against Corruption (SEA-PAC).
7	Regional workshop on promoting integrity and preventing corruption in law enforcement authorities di Bangkok, Thailand, 30 april – 2 may 2019	Workshop ini bertujuan untuk berbagi praktik-praktik terbaik, tantangan dan kisah sukses mengenai integritas dan pencegahan korupsi dalam penegakan hukum. Workshop ini akan dihadiri oleh perwakilan tingkat senior dari kepolisian, lembaga antikorupsi, imigrasi dan cukai, serta lembaga pengawas lainnya dari negara-negara ASEAN. KPK berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan menjadi salah satu narasumber.
8	Regional Workshop on Asset Declarations and Conflicts of Interest System in Southeast Asia, 11-13 Juni 2019 di Bangkok, Thailand.	Workshop ini bertujuan untuk berbagi praktik-praktik terbaik dan tantangan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), termasuk aturan yang terkait dengan konflik kepentingan di kawasan Asia Tenggara. KPK berpartisipasi aktif menjadi narasumber yang memaparkan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan sistem LHKPN Indonesia.
9	Expert Group Meeting Corruption involving Vast Quantities of Assets 12-14 June 2019, Oslo, Norway	Workshop ini bertujuan untuk para ahli dari berbagai negara berbagi praktik-praktik terbaik, tantangan dan kisah sukses mengenai penanganan kasus korupsi dengan jumlah hasil kejahatan korupsi/aset yang besar. Diskusi ahli ini dihadiri oleh pimpinan KPK dan jaksa KPK.

No.	Kegiatan	Keterangan
10	Regional Workshop on Promoting Beneficial Ownership Transparency in Southeast Asia, di Kuala Lumpur Malaysia, 22-23 Juli 2019	Workshop ini bertujuan untuk berbagi praktik-praktik terbaik, tantangan dan kisah sukses mengenai transparansi kepemilikan manfaat (beneficial ownership) dari entitas swasta. KPK berpartisipasi aktif menjadi salah satu narasumber dengan memaparkan mengenai progres Indonesia terkait sistem registrasi Beneficial Ownership.
11	International Seminar on Conflict of Interest in ASEAN Region, di Bangkok, Thailand, 4-6 September 2019	Seminar yang diadakan oleh NACC Thailand ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran pada peserta mengenai berbagai jenis teknik antikorupsi yang advanced untuk menangani konflik kepentingan di level regional dan global.
12	Regional Workshop on International Cooperation in complex, cross-border corruption cases, 19-20 November 2019 di Yangon, Myanma	Workshop ini bertujuan untuk mendiskusikan praktik terbaik, tantangan, keberhasilan dalam menghadapi berbagai tantangan yang terkait dengan bantuan hukum timbal balik/Mutual Legal Assistance (MLA) dan bentuk-bentuk kerja sama antarlembaga penegak hukum di regional Asia Tenggara, serta untuk mengeksplorasi upaya-upaya untuk meningkatkan kerja sama lintas negara terutama dalam penanganan kasus korupsi. KPK berpartisipasi menjadi salah satu narasumber mengenai pengalaman KPK dalam menangani transfer hasil-hasil kejahatan korupsi ke luar negeri dan relevansi investigasi keuangan dalam penanganan kasus korupsi.
13	Pertemuan tahunan ECAN (Economic Crime Agencies Network) 2019. Pelaksanaan di Auckland, New Zealand pada tanggal 5-6 Maret 2019.	Forum ini adalah wadah kerjasama internasional antar lembaga penegak hukum yang menangani kejahatan yang terkait keuangan (di antaranya adalah korupsi) yang dibuat untuk meningkatkan kerja sama dalam penanganan perkara (misalnya: penyidikan paralel atau bersama), berbagi informasi dan data intelijen untuk penegakan hukum, berbagi informasi kebijakan dan inisiatif untuk peningkatan kualitas penanganan perkara, dan pengembangan kapasitas personel & kelembagaan anggota ECAN.

Implementasi Kerja Sama Bilateral dan Internasional Lainnya

No.	Mitra	Keterangan
1	ICAC Hong Kong	Pertemuan bilateral dengan Pimpinan ICAC dan sharing session mengenai pencegahan, penindakan dan program pelatihan, 25-26 Februari 2019
2	CIABOC Sri Lanka	Pertemuan bilateral, CIABOC belajar dari KPK mengenai pencegahan korupsi di ACLC, 1-4 April 2019
3	FBI Amerika Serikat	Kunjungan kerja wakil Direktur FBI di KPK dan pemberian penghargaan kepada penyidik, PJKAKI, penuntut dalam kerja sama investigasi kasus korupsi, 5 Juni 2019
4	Vietnam Ho Chi Minh Inspectorate	Pertemuan Bilateral dan sharing mengenai KPK dan pencegahan korupsi di Indonesia, 20 Juni 2019
5	Nazaha Arab Saudi	Kunjungan bilateral Pimpinan KPK ke Nazaha Arab Saudi, Sharing session tentang pencegahan dan penindakan korupsi, 21-25 April 2019
		KPK mengirimkan 2 orang peserta untuk mengikuti Pelatihan di Nazaha, 8-11 Juli 2019

No.	Mitra	Keterangan
6	MACC Malaysia	Sharing session mengenai kegiatan intelijen dengan Direktorat Monitor KPK, 4 Juli 2019
7	FEACC Ethiopia	FEACC belajar mengenai penindakan dan pencegahan korupsi yang dilakukan KPK di ACLC, 7-9 Oktober 2019
8	U4, GIZ, MEC Afghanistan,	Penyelenggaraan workshop Monitoring and evaluation for strategic anti-corruption communication and outreach di ACLC untuk pegawai MEC Afghanistan dan KPK, 21-25 April 2019
9	U4, GIZ	KPK bekerjasama dengan U4 dan GIZ menyelenggarakan Reducing corruption in the forest sector: Nurturing success via the One Map initiative, peserta K/L terkait One map policy dan perwakilan negara donor, 8-9 Oktober 2019
10	ACRC Korea	Penyelenggaraan Workshop on Corruption Risk Assessment (Direktorat litbang belajar dari narasumber dari ACRC Korea mengenai Corruption Risk Assessment), 7-9 Oktober 2019
11	FBI US	Sharing Session antar tim forensic Accounting KPK dnegan Expert forensic Acccounting FBI, 2-5 Desember 2019
12	Wakil Duta Besar Inggris, Duta Besar Australia, Perwakilan US DOJ/OPDAT, Delegasi Young U.S Political Leaders, The United States - Indonesia Society (USINDO), Duta Besar Swiss, Delegasi Kongres Peru, EITI Myanmar, Perwakilan ADB, Dubes Korea Selatan, Duta Besar Inggris, U.S. Congressman David Price, Chairman of the House Democracy Partnership (HDP), Duta Besar Denmark, Delegasi Ombudsman Denmark, Islamic Development Bank (IsDB), BPK Tunisia, World Justice Project (WJP)	Kunjungan bilateral / courtesy call pada pimpinan KPK selama tahun 2019
13	Otoritas Pusat Indonesia (Kementerian Hukum dan HAM), Otoritas Pusat Negara Singapura, Inggris, Australia, dan Perancis	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka mendukung penanganan perkara KPK, Direktorat PJKAKI bersama Deputi Penindakan meminta bantuan otoritas pusat untuk mendapatkan Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) dari wilayah hukum Singapura, Inggris, Australia dan Perancis. Bantuan dalam bentuk informasi & data, dokumen dan upaya pengembalian aset dari luar negeri ke Indonesia. - KPK juga memberikan bantuan hukum kepada Thailand untuk penanganan perkara Thailand yang melibatkan wilayah hukum dan warga negara Indonesia.
14	CPIB Singapura, FBI US, NACC Thailand, MACC Malaysia, NCA RRT, ICAC Hong Kong, IACCC UK, Nazaha Arab Saudi, AGD Australia	Dalam rangka mendukung penanganan perkara KPK, Direktorat PJKAKI bersama Deputi Penindakan meminta bantuan melalui mekanisme antarlembaga (non-MLA) untuk pencarian data & informasi, penyampaian surat panggilan, penelusuran lokasi tersangka dan saksi dan wawancara saksi di luar negeri.

No.	Mitra	Keterangan
15	FBI US, ACB Brunei Darussalam, CPIB Singapura	KPK memberikan bantuan melalui mekanisme antar lembaga (non-MLA) untuk pencarian data & informasi, penelusuran lokasi saksi WNI, wawancara saksi WNI.
16	Department of Justice/FBI US	KPK menerima penghargaan dari FBI atas kerja sama antara KPK-FBI yang dapat dijadikan contoh baik dalam penanganan perkara lintas batas negara. KPK juga memberikan penghargaan kepada FBI atas bantuannya dalam penanganan perkara EKTP.
17	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	FGD Pemanfaatan INAPROC/SPSE dalam pengembangan Big Data dengan LKPP, Bogor, 4 - 5 April 2019
18	Penyedia Jasa Telekomunikasi	Workshop Pembinaan Jaringan Kerjasama dengan Penyedia Jasa Telekomunikasi, Yogyakarta, 26 - 28 Juni 2019
19	World Resources Institute (WRI) Indonesia	FGD Pengembangan Sistem Informasi Perizinan SDA dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia, Bogor, 1 - 2 Agustus 2019
20	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Workshop Pembinaan Jaringan Kerjasama dengan PPATK, Bandung, 28 - 30 Agustus 2019

Implementasi Kerja Sama Nasional

No.	Mitra	Keterangan
Kerja Sama Dalam Rangka Mendorong Pemulihan Aset		
1	Ditjen Pajak Kemenkeu	<p>Dalam rangka mendukung implementasi komitmen global terkait asset recovery, Direktorat PJKAKI telah melakukan berbagai kegiatan dan kerja sama dengan lembaga terkait, di antaranya adalah Ditjen Pajak. KPK bersama-sama dengan Ditjen pajak melakukan studi terkait optimalisasi pengembalian kerugian negara dengan pembebanan pajak pada perkara tindak pidana korupsi. Studi ini dilakukan untuk menjawab berbagai pertanyaan antara lain; apakah penjatuhan pidana yang memiliki konsekuensi finansial terhadap pelaku korupsi menghapuskan kewajiban pajak atas peningkatan kekayaannya? Apakah dimungkinkan untuk memasukkan kewajiban pajak terutang tersebut, sebagai bagian kerugian keuangan negara dalam dakwaan dan tuntutan dalam perkara korupsi? Bagaimana mekanisme koordinasi yang seharusnya dibangun antara penegak hukum dan otoritas pajak?</p> <p>Rekomendasi dari studi tersebut di antaranya adalah diperlukan kerja sama dengan pendekatan multidoor approach antara penegak hukum dan otoritas pajak. KPK dan Ditjen Pajak juga sepakat untuk bekerja sama melakukan penanganan perkara serta pertukaran data dan informasi yang dituangkan dalam Peraturan Bersama (PERBER) antara KPK dan Kementerian Keuangan.</p>
2	OECD dan Ditjen Pajak Kemenkeu	<p>Dalam rangka membahas dan mendiskusikan standar internasional penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pajak, praktik terbaik kerja sama penegak hukum dan otoritas pajak di negara pihak OECD dan negara lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pajak, serta implementasi dan tantangan kerja sama antara penegak hukum dan otoritas pajak dalam penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pajak, Dit. PJKAKI melakukan workshsop "Optimalisasi Pemulihan Kerugian Negara Dengan Instrumen Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pajak (Komparasi Indonesia dan Negara Lain)" di Hotel Wyndam Jakarta pada 28-29 November 2019. Adapun narasumber kegiatan ini antara lain; Ms. Leah Ambler (Legal Analyst and Manager, Asia-Pacific Anti-Corruption Division, Directorate for Financial and Enterprise Affairs), Ms. Emma Scott (Programme Lead, OECD Tax Crime Academy, International Co-operation and Tax Administration Division, Centre for Tax Policy and Administration), HM Revenue and Customs (HMRC Inggris).</p>

No.	Mitra	Keterangan
3	Departement of Home Affairs Australia	<p>Dalam rangka mendukung pemulihan aset, salah satu instrumen pemulihan aset yang efektif adalah dengan instrumen pencucian uang. Namun demikian, secara fakta penanganan TPPU masih sangat rendah dibandingkan dengan tindak pidana asal. Masih relatif rendahnya penanganan TPPU dengan tindak pidana asal korupsi salah satunya disebabkan karena penegak hukum masih fokus pada pendekatan <i>follow the suspect</i> semata bukan <i>follow the asset</i> atau <i>follow the money</i> serta perbedaan paradigma dalam penanganannya. Untuk itu, dalam rangka mendukung optimalisasi penanganan perkara TPPU, maka peningkatan kompetensi penegak hukum sangat diperlukan. Untuk itu, KPK bersama-sama dengan Departement of Home Affairs Australia menyusun buku "Memahami Tipologi TPPU dan Bagaimana Penanganannya" berdasarkan 19 (sembilan belas) perkara TPPU yang ditangani KPK dan telah berkekuatan hukum tetap serta best practice dari luar negeri.</p>
4	Departement of Home Affairs Australia	<p>Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Pedoman Teknis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal tahun 2018 yang lalu, maka KPK bekerja sama dengan Australia Department of Home Affairs dan Australia Indonesia Partnership of Justice (AIPJ) membangun E-learning Pedoman Teknis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal tersebut. Dengan adanya E-learning ini akan semakin memudahkan penegak hukum meningkatkan kapasitasnya dalam penanganan TPPU di pasar modal.</p>
5	United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)	<p>KPK telah melakukan berbagai upaya dalam penyelamatan sumber daya alam termasuk sektor kehutanan dalam beberapa tahun terakhir yang dikenal dengan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA). Diluncurkan sejak 2014, gerakan ini menyepakati komitmen dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk mengimplementasikan berbagai rencana aksi sesuai rekomendasi KPK. Gerakan ini telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah terkait dengan membangun sistem digital (e-government) untuk administrasi hutan. Dengan peran penting sektor kehutanan di Indonesia dan rentannya kerugian negara yang sangat besar, KPK bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melakukan inisiasi kegiatan analisa resiko korupsi di sektor kehutanan sebagai tindak lanjut dari pengembangan tata kelola di sektor kehutanan. Analisis risiko telah dilakukan di dua wilayah yaitu Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Hasil akhir studi ini akan dipaparkan kepada <i>stakeholders</i> terkait di tingkat kementerian pusat untuk bersama-sama menyusun rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan di waktu yang akan datang untuk tata kelola di sektor kehutanan yang lebih baik lagi.</p>

No.	Mitra	Keterangan
Kerja Sama Dalam Mendorong Kepastian Hukum Dalam Rangka Investasi yang Lebih Baik		
6	Transparency International Indonesia dan USAid	<p>Korupsi menghambat produktivitas, investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi juga menghambat investasi asing karena menciptakan lingkungan bisnis yang berisiko tinggi. <i>Ease of doing business</i> di sebuah negara terbukti dipengaruhi tingkat korupsi di negara tersebut dimana semakin rendah korupsi, semakin kondusif investasinya. Para ekonom pun sepakat bahwa korupsi bisa mengganggu perekonomian nasional. Dalam telaahnya, ekonom menilai korupsi memberikan banyak dampak pada ekonomi nasional antara lain mengancam eksistensi pemerintah, menyuburkan terorisme dan ekstrimisme, mendorong kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, menyuburkan budaya egois dan tidak jujur; meningkatkan kejahatan lain yang terkait dengan korupsi. Untuk membantu menjawab tantangan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan <i>Transparency International Indonesia</i> dan USAid menyelenggarakan kegiatan seminar tingkat tinggi dengan tema Komitmen Anti Korupsi untuk Investasi yang Lebih Baik. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 300 orang peserta yang terdiri dari berbagai lembaga pemerintah, swasta, penegak hukum, asosiasi industri dan civitas akademika. Kegiatan ini juga turut menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, salah satunya Prof. Robert Klitgaard dari Claremont Graduate University. Sebagai salah satu upaya konkret, kegiatan ini juga menyampaikan kertas rekomendasi bagi pemerintah dan regulator, serta bagi pelaku bisnis untuk berkomitmen dalam menciptakan iklim investasi dan bisnis yang berintegritas dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.</p>
Kerja Sama Lainnya		
7	Penyedia Jasa Telekomunikasi	Workshop Pembinaan Jaringan Kerjasama dengan Penyedia Jasa Telekomunikasi, Yogyakarta, 26 - 28 Juni 2019
8	World Resources Institute (WRI) Indonesia	FGD Pengembangan Sistem Informasi Perizinan SDA dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia, Bogor, 1 - 2 Agustus 2019
9	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Workshop Pembinaan Jaringan Kerjasama dengan PPATK, Bandung, 28 - 30 Agustus 2019

No.	Mitra	Keterangan
10	IAIN Jember, IAIN Kediri, IAIN Manado, IAINU Kebumen, Politeknik Kesehatan Denpasar, Politeknik Negeri Manado, Poltekkes Kemenkes Semarang, Poltekkes Tanjungkarang, STAI Sunan Pandanaran, STAI Al Hikmah, STAI Al-Qodiri Jember, STIA & P ADS Palembang, STIH Sumpah Pemuda, The SMERU Research Institute, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Sunan Ampel, UIN Sunan Kalijaga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Airlangga, Universitas Atmajaya Makassar, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Darma Agung, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gorontalo, Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Raden Rahmat, Universitas Islam Riau, Universitas Janabadra, Universitas Jember, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, Universitas Katolik Parahyanganm Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Lampung, Universitas Mataram, Universitas Muhammadiyah Kendari, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Mulawarman, Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Paramadina, Universitas Patria Artha, Universitas Pattimura, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Sebelas Maret, Universitas Sriwijaya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Telkom, Universitas Tomakaka, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Udayana, Universitas Widya Mataram, UNU Surabaya, UPN Veteran Jawa Timur	Pelatihan Penulisan Ilmiah Populer bagi Akademisi Anti-Korupsi - Implementasi Komitmen Anti Corruption Summit 3

No.	Mitra	Keterangan
11	Universitas Andalas	Pelatihan Penulisan Ilmiah Populer bagi Akademisi Anti-Korupsi - Implementasi Komitmen Anti Corruption Summit 3
		Konsolidasi Perguruan Tinggi - Implementasi ACS 3 Wilayah Bali, Bengkulu, Sumut dan Sumbar
12	Universitas Bengkulu	Pelatihan Penulisan Ilmiah Populer bagi Akademisi Anti-Korupsi - Implementasi Komitmen Anti Corruption Summit 3
		Konsolidasi Perguruan Tinggi - Implementasi ACS 3 Wilayah Bengkulu
13	Universitas Bung Hatta	Pelatihan Penulisan Ilmiah Populer bagi Akademisi Anti-Korupsi - Implementasi Komitmen Anti Corruption Summit 3
		Konsolidasi Perguruan Tinggi - Implementasi ACS 3 Wilayah Sumbar
14	Universitas Mahasaraswati	Pelatihan Penulisan Ilmiah Populer bagi Akademisi Anti-Korupsi - Implementasi Komitmen Anti Corruption Summit 3
		Konsolidasi Perguruan Tinggi - Implementasi ACS 3 Wilayah Bali
15	Universitas Mahendradatta	Pelatihan Penulisan Ilmiah Populer bagi Akademisi Anti-Korupsi - Implementasi Komitmen Anti Corruption Summit 3
		Konsolidasi Perguruan Tinggi - Implementasi ACS 3 Wilayah Bali
16	Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., M.H., Universitas Muhammadiyah Bengkulu, IAIN Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Universitas Ekasakti, Universitas Medan Area, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas HKBP Nommensen, Universitas Methodist Indonesia, Universitas Katolik Santo Thomas, Universitas Pelita Harapan Medan	Konsolidasi Perguruan Tinggi - Implementasi Komitmen ACS III Wilayah Barat
17	Universitas Mahasaraswati, Universitas Mahendradatta, Universitas Airlangga, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Trunojoyo Madura, UIN Sunan Ampel, Universitas Surabaya	Konsolidasi Perguruan Tinggi - Implementasi Komitmen ACS III Wilayah Tengah
18	Universitas Palangka Raya, Universitas Lampung, UIN Raden Fatah, Universitas Islam Malang, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Khairun	Pembentukan Pusat Kajian Anti Korupsi
19	Akademisi Anti Korupsi	50 artikel terpublikasi di media cetak/daring
20	Akademisi Anti Korupsi	90 draft artikel/opini dengan isu antikorupsi

No.	Mitra	Keterangan
21	Universitas Telkom	KPK Corner dan kerja sama literasi antikorupsi
22	Universitas Lambung Mangkurat	KPK Corner dan kerja sama literasi antikorupsi
23	Pomdam Jaya/Jayakarta	Evaluasi Kerja Sama KPK dan Pomdam Jaya Dalam Rangka Pinjam Pakai Rutan Pomdam Kodam Jaya Jayakarta Pada Tanggal 22 Agustus 2019 di Jakarta
24	Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, BPJS Kesehatan, Kemenkes, BPJS Ketenagakerjaan, Kemendes, Kemendagri, Kemenkeu, BPS	Pembinaan jaringan dengan kementerian dan lembaga RI yang dilaksanakan pada 2 Oktober 2019 di Jakarta
25	LPDP, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, UI, ITB, UGM, UNS, ITS, PT. Pertamina, PT. PLN, PT. Wikaikon, PT. Pindad, LEN	Rapat Koordinasi Pembahasan Peta Jalan Riset dan Pengembangan Kendaraan Indonesia Listrik 2019-2024 pada 15 Agustus 2019 di Jakarta
26	Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, BPJS Kesehatan, Kemenkes, BPJS Ketenagakerjaan, Kemendes, Kemendagri, Kemenkeu, BPS	Pemanfaatan kerja sama terkait permintaan data dan informasi untuk memenuhi data platform JAGA. Pelaksanaan : Januari -Desember 2019
27	Kementerian PPN/Bappenas, BPS dan Kementerian Dalam Negeri	Rapat Pembahasan Kerja Sama Survei Penilaian Integritas (Evaluasi SPI 2019 dan Persiapan SPI 2020) terkait Mekanisme Kerja Sama dan Skema Pembiayaan Pelaksanaan SPI 2020 dilaksanakan Pada 20 November 2019 di Jakarta
28	BPJS Ketenagakerjaan	Evaluasi Kerja Sama KPK-BPJS Ketenagakerjaan dan Rencana Tindak Lanjut Implementasi Kerja Sama Tahun 2020 yang dilaksanakan Pada Tanggal 25 November 2019 di Jakarta
29	AK3, Jendela Ide, LBH Bandung, PBHI Bandung, AJI Bandung, WALHI Jawa Barat, ALAM Jabar, Turun Tangan, Pinter Pilih, Inisiatif, YPM Salman, F-SEDAR, KSBSI, Klinik Anti Korupsi FH Unpad, Prodi Administrasi Publik Unpar, Lingkar Pemilih Muda, AAI Jabar	Peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Jawa Barat

No.	Mitra	Keterangan
30	Migrant Care, Puskapsi Universitas Jember, LP2M Universitas Jember, Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat, Studi Dialektika Indonesia dalam Perspektif (SD Inpers), Tanoker, Konservasi Alam Indonesia Lestari, Migrant Aid Indonesia, Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Jember, Koalisi Perempuan Indonesia Jember, LTNNU Jember, AJI Jember, Aisyiyah Jember, Radar Jember, FLAC Jember	Peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Jember
31	Komunitas Seni Lawan Korupsi, YLBHI Bali, Manikaya Kauci, Taman Baca Kesiman, PPMI, Walhi Bali, For Bali, Sloka Institute, LPM Brahmaska, LPM Kerta Aksara Udayana, AJI Denpasar, Bale Bengong, Komunitas Jekape, Komunitas Pojok	Peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Bali
32	UIN Sunan Kalijaga, KBR, Cendi UIN Sunan Kalijaga, FNKSDA, AJI Yogyakarta, KMSYI, Walhi Yogyakarta, PSM UPN, Kapala Indonesia, Antara, Gatra, Tirto, LBH Yogyakarta, Sarang Lidi, PIA Yogyakarta, UGM, LPM Jurnal, LPM Pendapa, LPM Rethor, SP Kinasih, Yayasan Satu Nama, AURIGA	Diseminasi hasil Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Yogyakarta
33	Universitas Mulawarman, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, PWYP, Jaringan Seknas Fitra, Pokja 30, Walhi Kalimantan Timur, AURIGA	Diseminasi hasil Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Samarinda
34	Universitas Khairun dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, AURIGA	Diseminasi hasil Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Ternate
35	Pattiro Semarang, TI, Pemkot Padang Panjang, SPAK, Pusako Universitas Andalas, Komunitas Penyuluh BKKBN Kota Padangpanjang, GOW Kota Padangpanjang, LKAAN Kota Padangpanjang, OPD Kota Padangpanjang	Pembinaan jaringan partisipatif dalam mengawal keterbukaan pemerintah di Kota Padangpanjang